



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN
2020**



DISKOMINFO
KALTIM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, Februari 2021

Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIVE

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	3,14	112,14

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu **2,8** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **3,14** dengan **predikat baik**.

Walaupun capaian kinerja di tahun 2019 sudah melebihi dari target yang ditentukan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tetap terus meningkatkan pencapaian program/kegiatan yang bermutu dan bermanfaat bagi Kalimantan Timur agar orientasi hasil tidak hanya berdasarkan outcome tetapi juga impact.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Aparatur	3
E. Aspek Organisasi Strategis	3
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	4
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019	12
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	17
C. Analisis Capaian Kinerja	18
D. Realisasi Anggaran	23
BAB IV. PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan	3
Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.	4
Tabel 2.1	Perencanaan Strategis	8
Tabel 2.2	Program Prioritas Dan Kegiatan Pendukungnya	8
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023	9
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	10
Tabel 2.5	Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	11
Tabel 2.6	Anggaran per Sasaran StrategisS	11
Tabel 3.1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019	12
Tabel 3.2.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	13
Tabel 3.3.	Predikat Indeks SPBE	17
Tabel 3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020	17
Tabel 3.5.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020	18
Tabel 3.6.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019	18
Tabel 3.7.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target RPJMD/RENSTRA	19
Tabel 3.8.	Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional	19
Tabel 3.9.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	20
Tabel 3.10.	Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.	21
Tabel 3.11.	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	23
Tabel 3.12.	Realisasi anggaran per program dan Kegiatan	23



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama / Individu Tahun 2021
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 4. Laporan Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB Tahun 2020
- Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
4. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
5. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
6. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
8. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 2 ayat 1 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi sub bagian;
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan, membawahi;
 1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik
- d. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahi;
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
- e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan (APTIKA), membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi
 2. Seksi Pengelolaan E-Government
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi
- f. Bidang Statistik Membawahi;
 1. Seksi Statistik Sosial
 2. Seksi Statistik Ekonomi
 3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Pranata Humas.
 - 2. Pranata Komputer.
 - 3. Arsiparis.

D. Sumber Daya Aparatur

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris		1	1				1					
Jlh PNS	39	21	11	37	12		15	20	5	16	2	
Jlh Honor/PTT	31	30						41	3	15	1	
Jlh PNS + Honor/PTT	70	51	11	37	12		17	61	8	31	3	
Jumlah												

E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui pembangunan telecenter di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
4. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian SKPD oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
5. Pembangunan Data Center.
6. Dialog interaktif.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SPBE belum optimal.
2. Tuntutan publik terhadap keterbukaan Informasi semakin tinggi.

Sehingga akar permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi ke depan adalah:

1. Belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu
2. Belum diterapkannya SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
3. Jangkauan infrastruktur TIK keseluruhan wilayah dan semua lapisan masyarakat belum optimal.
4. Keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK.
5. Belum terstandarisasinya sistem keamanan informasi elektronik (TIK).
6. Masih tingginya konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi hoax.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tanah	2.242	m ²
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Ruang CS	1	Ruang
12	Komputer	72	Unit
13	Laptop	69	Unit
14	Ruang Persediaan	1	Ruang
15	Ruang Pengadaan	1	Ruang
16	Mobil Dinas	5	Unit
17	Mobil operasional	8	Unit



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

18	Motor Dinas	7	Unit
19	Kantin	1	Buah
20	Website	1	Buah
21	Papan Pengumuman	1	Buah
22	LED Display	3	Buah
23	Mushola	1	Unit

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi, Aplikasi Informatika, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Tabel 2.1 Perencanaan Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3 Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5 Indeks	6	7 2,66	8 2,82	9 3,03	10 3,21	11 3,54

Tabel 2.2. Program Prioritas Dan Kegiatan Pendukungnya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	3 Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5 Indeks	6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7 1 Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2 Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah 3 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 4 Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota 5 Pembinaan dan Pengembangan Telecenter



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Komunikasi dan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$n\ 1 \text{ -----} \times 100\%$ $n\ 0$ <p>Dimana: n 1 = Nilai Indeks SPBE n 0 = Nilai ambang bawah indeks/ predikat SPBE yang ditetapkan: a. 4,2 = Memuaskan b. 3,5 = Sangat Baik c. 2,6 = Baik d. 1,8 = Cukup e. 0 = Kurang</p>	Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8

1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp Rp29.088.491.800,-, mengalami refocusing/penyesuaian anggaran sebesar Rp6.726.287.644,- sehingga APBD menjadi sebesar Rp 22.362.204.156,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 mendapatkan tambahan dana sebesar Rp3.465.000.125,- menjadi Rp. Rp25.827.204.281,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.850.150.000,- dan Belanja Langsung Rp15.977.054.281,-

2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.850.150.000	8.251.981.479	83,77
2	Belanja Langsung	15.977.054.281	14.292.270.850	89,45
	Jumlah	25.827.204.281	22.544.252.329	87,29

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran per Sasaran Strategis.

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	15.977.054.281	100%	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019**

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 55,15 atau dengan predikat penilaian CC (Cukup) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	20,38	20,14
2	Pengukuran Kinerja	25%	11,88	10,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,07	10,87
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,12	2,21
5	Capaian Kinerja	20%	9,38	11,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	56,83	55,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

*Nilai 2 (dua) Tahun terakhir

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renstra seharusnya telah menyajikan IKU • Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) seharusnya memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik; • Target kinerja seharusnya ditetapkan dengan baik; • Program/kegiatan seharusnya digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/kegiatan; • Dokumen Renstra seharusnya selaras dengan Dokumen RPJMD • Dokumen Renstra seharusnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan; • Target jangka menengah dalam Renstra seharusnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; • Dokumen Renstra seharusnya direviu secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Program/tujuan telah disusun selaras dengan tujuan dan sasaran. • Telah dilakukan review terhadap renstra agar selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines dan isu strategis yang berkembang di daerah. • Tujuan dan sasaran pada PK telah relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, dan memuat sasaran yang diwujudkan dalam renstra, selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines, dan mencantumkan target kinerja secara periodic didalam dokumen rencana aksi. • Telah dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja. • Target rencana aksi telah dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi capaian 	

2	<p>Pengukuran kinerja :</p> <p>a. Kualitas Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran (indicator) kinerja eselon II dan IV seharusnya memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik; • Indikator kinerja eselon III dan IV seharusnya selaras dengan indicator kinerja atasannya; • Seharusnya terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya; • Pengukuran kinerja seharusnya dilakukan secara berjenjang • Pengumpulan data kinerja seharusnya dapat diandalkan; • Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi seharusnya dilakukan secara berkala • Pengukuran kinerja seharusnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi <p>b. Implementasi Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKU seharusnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen 	<p>output kegiatan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kinerja yang dibuat telah selaras dengan kinerja bawahannya. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • IKU telah representative untuk mengukur kinerja yang seharusnya jumlahnya memadai dan menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya. • Telah memanfaatkan Pengukuran rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan progres,tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditentukan oleh PermanpanRB

	<p>perencanaan dan anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKU seharusnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; • Target kinerja eselon III dan IV seharusnya dimonitor pencapaiannya; • Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas seharusnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment; • IKU seharusnya direviu secara berkala; • Pengukuran kinerja atas rencana aksi seharusnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala; 		
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <p>a. Penyajian Informasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi kinerja dalam laporan kinerja seharusnya dapat diandalkan. <p>b. Pemanfaatan Informasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk : • Perbaikan perencanaan; • Menilai Serta memperbaiki pelaksanaan program dan 	<p>a. IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah,rencana tahunan,penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.</p>	<p>a. Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen</p>

	<p>kegiatan organisasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja; • Penilaian kinerja; 	<p>b. Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjajikan.</p> <p>c. Telah Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.</p>	
<p>4</p> <p>Evaluasi Internal :</p> <p>a. Pemenuhan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seharusnya terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya; • Seharusnya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi; • Hasil Evaluasi seharusnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. <p>b. Kualitas Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi program seharusnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program; • Evaluasi program seharusnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan; 		<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi. • Telah melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan. • Telah melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi rencana aksi telah melalui pembahasan secara bertahap melalui rapat triwulan • Pemantauan rencana aksi secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan rencana aksi pertriwulan



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan rencana aksi seharusnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;• Pemantauan rencana aksi seharusnya memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;• Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan setiap periode; <p>c. Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil evaluasi program seharusnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.		
5	<p>Pencapaian Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan, dan dilakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan dicapai. ketersediaan sumber dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus telah memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	2,8	3,14	112,14

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu **"Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi"** pada tahun 2020 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	3,14	112,14

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu **2,8** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **3,14** dengan **predikat baik**.

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	
1	2	3	4	5	$6 = (5/4 - 1) * 100$
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,04	3,14	0,1

Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target RPJMD/RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2020)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,5	3,14	0,90

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 sudah mencapai **3,14** dengan **predikat baik** jauh melebihi dengan target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu **2,82** dengan **predikat baik** sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD/RENSTRA pada tahun 2023 hanya menambah kekurangan sebesar 0,36 % dari target Indeks yang telah ditetapkan yaitu **3,5** dengan **predikat sangat baik**.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,14	2,26	71,97

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 sudah mencapai **3,14** dengan **predikat baik** jauh melebihi Standar Nasional Indeks SPBE yang ditetapkan yaitu **2,26** dengan **predikat baik**.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (Masing-masing Angka 1 s.d. 4)

Penyebab keberhasilan tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2020 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Telah dibentuk Tim Evaluator Internal SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 491/K.62/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim evaluator terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah : Diskominfo, Inspektorat, DPMPTSP, Bappeda, BKD, Bapenda, BPKAD, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Adbang.
2. Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.518/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim koordinasi terdiri dari Diskominfo = koordinasi strategis spbe, biro organisasi = percepatan spbe, BPKAD = penganggaran, Bappeda = tata kelola dan manajemen data. Pelaksana dalam tim ini adalah semua perangkat daerah.
3. Telah dibentuk Sekretariat Tim Evaluator Internal melalui SK Kepala DINas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur nomor 489/078/Diskominfo/2020 tentang Sekretariat Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan SPBE, komitmen Perangkat Daerah yang tidak egosektoral, SDM yang terlatih, dan pendanaan yang baik dari pusat dan daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 = (4-5)
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	112,14	87,29	24,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 112,14% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 87,29 %.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE	%	35	100%	100	Kabid Aplikasi dan Informatika	
		2	Persentase subdomain resmi " Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim	%	60	100%	100		
		3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam simpul TIK	%	43	43	100%		Kabid Teknologi Informasi dan Informatika
		4	Persentase Sinkronisasi data didalam pusat Data API	%	100	95	95		
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	1	Persentase Hosting/Co Location Server Perangkat Daerah pada Data Center	%	100	75	100	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

		2	Persentase keamanan sistem informasi Perangkat Daerah	%	75	75	100	
3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika		Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	%	90	73	81	Kabid Informasi dan Komunikasi publik
4	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah		Persentase Lembaga yang mengembangkan Media Center Informasi Publik	%	45	45	100	Kabid Informasi dan Komunikasi publik
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Persentase SDM yang memahami dan menguasai TIK	%	30	100%	100	Kabid Aplikasi dan Informatika
6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	%	98	94	96	Kabid Informasi dan Komunikasi publik
7	Program Penguatan dan evaluasi data dan statistik		Persentase Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi	%	80	80	100	Kabid WASDAL



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.11 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	2,8	3,14	112,14	25.827.204.281	22.544.252.329	87,29

Analisis :

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan
Tabel 3.12 Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.267.565.452	2.202.349.552	97,12	Kabid Aplikasi dan Informatika
	1. Penguatan SPBE	369.365.852	334.990.852	90,69	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika
	2. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	810.350.000	802.009.600	98,97	Kasi Pengelolaan E-Government
	3. Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah	809.700.000	802.997.500	99,17	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

	4. Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota (interoperabilitas)	134.624.6000	123.331.600	91,61	Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
	5. Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	143.525.000	139.020.000	96,86	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	3.203.742.463	2.220.117.784	69,30	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika, Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid WASDAL
	1. Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi/Website) Perangkat Daerah di Prov.Kaltim	44.145.275	41.776.675	94,63	Kasi Pengolahan Domain dan Aplikasi
	2. Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center dan DRC	1.817.725.000	1.431.921.500	78,78	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
	3. Pelaksanaan Audit TIK	68.490.500	50.807.500	74,18	Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi
	4. Penanganan Insiden Keamanan Informasi	1.057.010.500	500.388.500	47,34	
	5. Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi,persandian,pos, dan telekomunikasi	150.000,000	147.703,042	98,47	Kasi Sandi dan Telekomunikasi
3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	1.220.517.600	1.104.271.150	90,48	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah melalui Poster, Leaflet, balho, dll	345.760.000	344.546.450	99,65	Kasi Media Publik dan Pameran
	2. Dokumentasi dan Publikasi program/kegiatan perangkat daerah	191.690.000	157.927.550	82,39	
	3. Partisipasi pada Pameran/Expo/pekan kebudayaan daerah dan di luar daerah	11.800.000	10.000.000	84,75	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

	4. Komunikasi Publik melalui dialog Interaktif radio dan televisi	42.750.000	6.278.000	14,69	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	5. Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan Pemerintah Daerah	628.517.600	585.519.150	93,16	
4	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah	1.155.795.340	1.120.619.040	96,96	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	67.260.000	56.759.500	84,39	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	983.735.340	963.959.540	97,99	
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	30.056.660	29.857.660	99,34	Kabid Aplikasi dan Informatika
	1. Peningkatan Sumber Daya TIK	30.056.660	29.857.660	99,34	Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK
6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	236.975.000	236.581.550	99,83	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pengembangan Sumber Informasi Publik	236.975.000	236.581.550	99,83	Kasi Pengelolaan Informasi Publik
7	Program Penguatan dan evaluasi data dan statistik	330.678.967	193.618.500	58,55	Kabid Wasdal
	1. Pengumpulan data statistik daerah	212.000.000	208.114.416	98,17	Kasi Wasdal Informatika dan Penyiaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019**

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 55,15 atau dengan predikat penilaian CC (Cukup) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	20,38	20,14
2	Pengukuran Kinerja	25%	11,88	10,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,07	10,87
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,12	2,21
5	Capaian Kinerja	20%	9,38	11,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	56,83	55,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

*Nilai 2 (dua) Tahun terakhir

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program atau kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran. • Melakukan review terhadap renstra untuk diselaraskan dengan RPJMD dengan berkoordinasi dengan Biro. • Menetapkan dokumen renstra dengan mengacu atau selaras dengan RPJMD, selaras dengan kontrak kinerja, selaras dengan tugas dan fungsi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang di daerah. • Tujuan dan sasaran pada PK relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, memenuhi criteria SMART. • Dokumen PK yang dibuat hendaknya memuat sasaran yang akan diwujudkan dalam renstra, target kinerja PK merupakan breakdown dari target-target kinerja dalam renstra dan sasaran, indikator dan target yang Ditetapkan dalam PK menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program/tujuan telah disusun selaras dengan tujuan dan sasaran. • Telah dilakukan review terhadap renstra agar selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines dan isu strategis yang berkembang di daerah. • Tujuan dan sasaran pada PK telah relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, dan memuat sasaran yang diwujudkan dalam renstra, selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines, dan mencantumkan target kinerja secara periodic didalam dokumen rencana aksi. • Telah dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja. • Target rencana aksi telah dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi capaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen



	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dokumen PK dengan mengacu/selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core business. • Mencantumkan target kinerja secara periodek didalam dokumen rencana aksi atas kinerja. • Agar dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja. • Agar target rencana aksi dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi capaian output kegiatan organisasi. • Perjanjian Kinerja yang dibuat harus selaras dengan kinerja bawahannya. 	<p>output kegiatan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kinerja yang dibuat telah selaras dengan kinerja bawahannya. 	
2	<p>Pengukuran kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKU dikatakan cukup apabila representative untuk mengukur kinerja yang seharusnya jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya. • Pengukuran rencana aksi agar dimanfaatkan menjadi dasar untuk menyimpulkan progrees,tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • IKU telah representative untuk mengukur kinerja yang seharusnya jumlahnya memadai dan menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya. • Telah memanfaatkan Pengukuran rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan progrees,tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditentukan oleh PermanpanRB



3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none">• IKU dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.• Agar laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.• Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.	<ul style="list-style-type: none">• IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.• Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.• Telah Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen
---	--	--	---



4	<p>Evaluasi Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi. • Melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan. • Melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi . 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi. • Telah melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan. • Telah melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi rencana aksi telah melalui pembahasan secara bertahap melalui rapat triwulan • Pemantauan rencana aksi secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan rencana aksi per triwulan
5	<p>Pencapaian Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus dapat diandalkan dan memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus telah memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	Triwulan I			
Triwulan II								
Triwulan III								
Triwulan IV					2,8	3,14	112,14	

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu **"Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi"** pada tahun 2020 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian $6=5/4*100$
1	2	3	4	5	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,8	3.14	112,14

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu **2,8** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **3,14** dengan **predikat baik**.

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2020 $6=(5/4-1)*100$
			2019	2020	
1	2	3	4	5	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,04	3,14	0,1

Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2019 ke tahun 2020.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target RPJMD/RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2020)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,5	3,14	0,90

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 sudah mencapai **3,14** dengan **predikat baik** jauh melebihi dengan target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu **2,82** dengan **predikat baik** sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD/RENSTRA pada tahun 2023 hanya menambah kekurangan sebesar 0,36 % dari target Indeks yang telah ditetapkan yaitu **3,5** dengan **predikat sangat baik**.

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,14	2,26	71,97

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 sudah mencapai **3,14** dengan **predikat baik** jauh melebihi Standar Nasional Indeks SPBE yang ditetapkan yaitu **2,26** dengan **predikat baik**.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (Masing-masing Angka 1 s.d. 4)

Penyebab keberhasilan tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2020 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Telah dibentuk Tim Evaluator Internal SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 491/K.62/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim evaluator terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah : Diskominfo, Inspektorat, DPMPTSP, Bappeda, BKD, Bapenda, BPKAD, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Adbang.
2. Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.518/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim koordinasi terdiri dari Diskominfo = koordinasi strategis spbe, biro organisasi = percepatan spbe, BPKAD = penganggaran, Bappeda = tata kelola dan manajemen data. Pelaksana dalam tim ini adalah semua perangkat daerah.
3. Telah dibentuk Sekretariat Tim Evaluator Internal melalui SK Kepala DINas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur nomor 489/078/Diskominfo/2020 tentang Sekretariat Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan SPBE, komitmen Perangkat Daerah yang tidak egosektoral, SDM yang terlatih, dan pendanaan yang baik dari pusat dan daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 = (4-5)
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	112,14	87,29	24,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 112,14% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 87,29 %.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE	%	35	100%	100	Kabid Aplikasi dan Informatika	
		2	Persentase subdomain resmi " Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim	%	60	100%	100		
		3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam simpul TIK	%	43	43	100%		Kabid Teknologi Informasi dan Informatika
		4	Persentase Sinkronisasi data didalam pusat Data API	%	100	95	95		
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	1	Persentase Hosting/Co Location Server Perangkat Daerah pada Data Center	%	100	75	100	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

2	Persentase keamanan sistem informasi Perangkat Daerah	%	75	75	100		
3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	%	90	73	81	Kabid Informasi dan Komunikasi publik	
4	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah	%	45	45	100	Kabid Informasi dan Komunikasi publik	
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	%	30	100%	100	Kabid Aplikasi dan Informatika	
6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	%	98	94	96	Kabid Informasi dan Komunikasi publik	
7	Program Penguatan dan evaluasi data dan statistik	%	80	80	100	Kabid WASDAL	



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.11 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	2,8	3,14	112,14	25.827.204.281	22.544.252.329	87,29

Analisis :

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan
Tabel 3.12 Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.267.565.452	2.202.349.552	97,12	Kabid Aplikasi dan Informatika
	1. Penguatan SPBE	369.365.852	334.990.852	90,69	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika
	2. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	810.350.000	802.009.600	98,97	Kasi Pengelolaan E-Government
	3. Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah	809.700.000	802.997.500	99,17	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

	4. Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota (interoperabilitas)	134.624.6000	123.331.600	91,61	Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
	5. Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	143.525.000	139.020.000	96,86	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	3.203.742.463	2.220.117.784	69,30	Kabid Teknologi Informasi dan Informatika, Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid WASDAL
	1. Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi/Website) Perangkat Daerah di Prov.Kaltim	44.145.275	41.776.675	94,63	Kasi Pengolahan Domain dan Aplikasi
	2. Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center dan DRC	1.817.725.000	1.431.921.500	78,78	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
	3. Pelaksanaan Audit TIK	68.490.500	50.807.500	74,18	Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi
	4. Penanganan Insiden Keamanan Informasi	1.057.010.500	500.388.500	47,34	
	5. Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi,persandian,pos, dan telekomunikasi	150.000,000	147.703,042	98,47	Kasi Sandi dan Telekomunikasi
3	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	1.220.517.600	1.104.271.150	90,48	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah melalui Poster, Leaflet, balho, dll	345.760.000	344.546.450	99,65	Kasi Media Publik dan Pameran
	2. Dokumentasi dan Publikasi program/kegiatan perangkat daerah	191.690.000	157.927.550	82,39	
	3. Partisipasi pada Pameran/Expo/pekan kebudayaan daerah dan di luar daerah	11.800.000	10.000.000	84,75	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020

	4. Komunikasi Publik melalui dialog Interaktif radio dan televisi	42.750.000	6.278.000	14,69	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	5. Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan Pemerintah Daerah	628.517.600	585.519.150	93,16	
4	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah	1.155.795.340	1.120.619.040	96,96	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	67.260.000	56.759.500	84,39	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	983.735.340	963.959.540	97,99	
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	30.056.660	29.857.660	99,34	Kabid Aplikasi dan Informatika
	1. Peningkatan Sumber Daya TIK	30.056.660	29.857.660	99,34	Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK
6	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	236.975.000	236.581.550	99,83	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
	1. Pengembangan Sumber Informasi Publik	236.975.000	236.581.550	99,83	Kasi Pengelolaan Informasi Publik
7	Program Penguatan dan evaluasi data dan statistik	330.678.967	193.618.500	58,55	Kabid Wasdal
	1. Pengumpulan data statistik daerah	212.000.000	208.114.416	98,17	Kasi Wasdal Informatika dan Penyiaran

BAB. IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. SARAN

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2020, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
2. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.